

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum selanjutnya disingkat BLU. Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan. Satuan kerja pemerintah yang dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang, jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang dan jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Namun, sebagai penyeimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang telah dibuatkan standarnya oleh menteri teknis pembina. Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan BLU.

Laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja keuangan BLU. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis AkruaI nomor 13 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 satuan kerja Badan Layanan Umum telah memiliki PSAP tersendiri. Hal ini membawa angin segar bagi satuan kerja yang menyanggah status Badan Layanan Umum agar memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun laporan keuangannya. Menurut Riyanto (2016), “sebelum PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU diterbitkan, penyajian laporan keuangan BLU belum diatur secara khusus oleh pemerintah dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), namun telah sedikit ditempelkan dalam PSAP Nomor 11 tentang akuntansi laporan keuangan konsolidasian”. Sesuai dengan PSAP Nomor 13 yang mengatur penyajian laporan keuangan BLU berbasis akrual dibuat dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. PSAP Nomor 13 menyatakan bahwa secara umum, standar akuntansi BLU mengacu pada seluruh PSAP dan mulai laporan keuangan Tahun Anggaran 2016, BLU harus menerapkan SAP berbasis akrual dan peraturan yang diatur khusus dalam PSAP Nomor 13. Penerapan SAP berbasis akrual memberikan konsekuensi bagi BLU untuk menyusun tujuh komponen laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Simanjuntak (2010:10), “suatu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi, oleh karena itu pemerintah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan SDM di bidang akuntansi pemerintah”. Hasil penelitian dari Rosiana (2015) diketahui terdapat pengaruh signifikan kualitas SDM terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual pada SKPD Kota Malang. Hal ini dijelaskan di dalam faktor pengetahuan, pelatihan, pengalaman, keterampilan yang dimiliki oleh SDM. Hasil penelitian Putra dan Ariyanto (2015) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

penerapan SAP berbasis akrual pada SKPD Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Sukadana dan Mimba (2015) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP di KPPN Denpasar.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan sistem informasi, Menurut (www.wikipedia.org), “sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen”. Kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hasil penelitian Permana dan Wiratmaja (2016) yang menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung. Sejalan dengan hasil penelitian Madjid (2016) yang membuktikan ketersediaan sistem informasi mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hasil tersebut membuktikan bahwa ketersediaan sistem informasi sangat menunjang keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Faktor selanjutnya adalah komitmen dari organisasi atau instansi, dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Simanjuntak (2010:31) juga menyatakan “dukungan kuat dari pimpinan merupakan kunci dari suatu perubahan, salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya pimpinan komitmen instansi pemerintah”. Putra dan Ariyanto (2015) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual pada SKPD Kabupaten Badung. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Permana dan Wiratmaja (2016) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung. Sedangkan hasil penelitian Asri (2015) tidak mampu

menemukan bukti adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Penelitian mengenai SAP berbasis akrual di Indonesia telah dilakukan oleh Rosiana (2015), Putra dan Ariyanto (2015), Sukadana dan Mimba (2015), Asri (2015), Hasibuan (2015), Permana dan Wiratmaja (2016), dan Madjid (2016). Namun objek penelitiannya adalah pemerintah daerah, sedangkan untuk BLU belum ada. Padahal sebagai perpanjangan tangan kementerian/lembaga negara dalam bidang pelayanan umum yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai penerapan SAP pada BLU agar dapat mencapai tujuan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan website PPK BLU, hingga Tahun 2015 sudah ada 150 BLU yang tersebar di Indonesia, dan BLU yang menyediakan pelayanan pendidikan memiliki jumlah paling banyak yaitu 63 yang terdiri dari akademi, sekolah tinggi, politeknik dan universitas.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada BLU perlu dilakukan, terutama karena penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan BLU masih baru, dan juga amanat PMK Nomor 217/PMK.05/2015 untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam menyajikan laporan keuangan BLU baru diberlakukan untuk Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menguji pengaruh dari faktor Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Ketersediaan Sistem Informasi, dan Komitmen Organisasi, terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada BLU. Penelitian terhadap penerapan SAP berbasis akrual pada BLU dan pengaruh dari faktor-faktor tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata tentang penerapan SAP berbasis akrual di Indonesia khususnya pada BLU. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul **“Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Staff Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Ketersediaan Sistem Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Kualitas Staff Keuangan, Ketersediaan Sistem Informasi, dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI pada Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Sumatera Selatan yang dipengaruhi oleh faktor kualitas staff keuangan, ketersediaan sistem informasi, dan komitmen organisasi. Penelitian ini mengambil dua BLU dari enam BLU yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sebagai objek penelitian. Dua BLU tersebut merupakan Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Kualitas Staff Keuangan terhadap Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui pengaruh Ketersediaan Sistem Informasi terhadap Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengetahui pengaruh Kualitas Staff Keuangan, Ketersediaan Sistem Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada BLU Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik, khususnya terhadap akuntansi berbasis akruaI dan penerapannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI.

3. Manfaat Lainnya

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam

menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan.

- b. Bagi BLU Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap BLU dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
- c. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan di bidang penelitian akuntansi pemerintahan.

